

**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SMP
NEGERI 1 KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

Robertus Sirang Framita

E01107109

Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

robethambrossio@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengangkat Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMPN 1 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan koordinasi yang dilakukan antar pihak sekolah telah terjadi proses komunikasi yang tidak baik, menyebabkan kerjasama antar pengurus dana BOS berjalan dengan tidak lancar. Mengenai sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah hanya secara garis besar saja sehingga pihak sekolah kurang memahami tentang peraturan penggunaan dana BOS yang begitu kompleks, hal ini menyebabkan sekolah membuat kebijakan sendiri dalam melaksanakannya mengakibatkan terdapat pengalokasian dana yang belum tepat sasaran. Monitoring yang dilakukan oleh tim manajemen BOS baik dari pusat atau provinsi telah dilakukan beberapa kali serta mengevaluasi program BOS yang telah dijalankan, namun masih ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Selain itu juga kemampuan sumber daya manusia yang belum begitu terampil dalam mengelola dana BOS. Hal ini terbukti dengan masih ada fasilitas penunjang sarana pendidikan yang kurang memadai dan yang telah rusak namun belum diperbaiki. Padahal mengenai perbaikan ringan sekolah untuk sarana pendidikan sudah tercantum dalam RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah). Sikap para pelaksana kebijakan tidak memiliki pandangan yang sama dalam usaha untuk mensukseskan pelaksanaan program yang menyebabkan para pelaksana kebijakan tidak bekerjasama dengan optimal dan menimbulkan permasalahan pada saat melaksanakan kebijakan.

Kata Kunci: Pelaksanaan program BOS, pengalokasian dana, kerjasama dalam pengambilan keputusan, dan sikap para pelaku kebijakan.

Abstract

This article raised school implementation grand program for the development of education in SMPN 1 in the district of Sintang. Approach used is qualitative approach. Results of research conducted to explain the coordination between the school has a process of communication that is not good, causing inter BOS fund trustees do not run smoothly. The socialization provided by the school education department is only in outline that school resulted in the lack of understanding about the use of BOS funds that the rules are so complex, this causes the school to make its own policy into practice resulted in the allocation of funds that are not well targeted. Monitoring conducted by the BOS management team either from central or provincial governments have done several times, and evaluate programs that have been implemented, but there are still problems that occur in practice. It is also human resources that have not been so skilled in managing BOS. This is evident by the still existing supporting facilities inadequate educational facilities and that have been damaged but not repaired. Though the mild improvement schools for education facilities are listed in RKAS (School Work Plan and Budget). The attitude of the implementers do not have the same view in an effort to succeed in the implementation of programs that lead the implementers did not cooperate with the optimal policy and cause problems when implementing policies.

Keywords: BOS program implementation, allocation of funds, collaboration in decision-making, and stakeholder attitudes.

PENDAHULUAN

Mulai tahun 2011 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011. Isi Undang-Undang tersebut yaitu pada pasal 1 ayat (29) yang menyebutkan bahwa: “Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa: “Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat”.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, menyebutkan bahwa: “Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar

Nasional Pendidikan”. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: SD/SDLB di kota Rp 400.000,-/siswa/tahun, SD/SDLB di kabupaten Rp 397.000,-/siswa/tahun, SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575.000,-/siswa/tahun, SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten Rp 570.000,-/siswa/tahun. Pada tahun anggaran 2011, dana BOS telah diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dan semester 1 tahun pelajaran 2011/2012. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Program BOS dilaksanakan dengan tidak langsung memberikan dananya kepada masing-masing siswa tetapi diberikan dan dikelola kepada sekolah yang bersangkutan. Pendanaan pelaksanaan BOS sepenuhnya dibiayai dari yang semula melalui skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian, diharapkan semua siswa dapat terbantu untuk mengikuti pendidikan yang lebih baik.

Selanjutnya pada SMP Negeri 1 Sintang program BOS dialokasikan untuk semua siswa yang bersekolah pada SMP tersebut tanpa terkecuali. Sehingga dapat diartikan siswa yang keadaan ekonominya di atas atau lemah semuanya mendapatkan bantuan dari program BOS yang dananya dikelola oleh sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, khusus pada SMP Negeri 1 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, pelaksanaan program BOS berdasarkan observasi penulis secara langsung, terdapat beberapa indikasi tentang pelaksanaan program BOS yang masih belum maksimal dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BOS yang telah ditetapkan. Indikasi permasalahan tersebut adalah tentang ketersediaan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan yang sudah rusak. Setelah observasi penulis yang dilakukan menunjukkan bahwa, infrastruktur sekolah pada SMP Negeri 1 Sintang masih terdapat beberapa fasilitas sekolah yang rusak. Kerusakan tersebut seperti, adanya kaca kelas yang sudah pecah, beberapa kursi dan meja belajar yang sudah tidak layak untuk digunakan, sanitasi sekolah yang masih minim dan tersumbat, termasuk adanya

salah satu WC yang tidak bisa digunakan karena telah rusak. Selain itu juga, ketersediaan buku-buku di perpustakaan yang sudah rusak karena dimakan usia. Padahal dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak BOS), program dana BOS yang didapat oleh sekolah dapat dialokasikan untuk pembiayaan perawatan sekolah terutama untuk kerusakan-kerusakan yang telah disebutkan dan untuk pembiayaan buku penunjang perpustakaan atau dapat disebut untuk pembiayaan perawatan sekolah. Dapat dikatakan bahwa alokasi penggunaan dana BOS yang belum tepat sasaran. Mengacu pada permasalahan yang muncul dari pelaksanaan program pemerintah tentang BOS, dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana dalam hal ini pihak sekolah dengan pihak pengawas dalam hal ini Komite Sekolah serta Dinas Pendidikan Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dalam pengambilan keputusan untuk pemanfaatan dana BOS agar dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pelaksanaan program BOS pada Tahun Ajaran 2011/2012 pada SMP Negeri 1 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, dan disposisi para pelaksana kebijakan”?

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka diperlukan suatu pembatasan agar permasalahan yang diteliti lebih terarah dan terfokus dengan maksud agar memudahkan dalam pembahasannya. Maka dari itu, peneliti memfokuskan penelitian ini pada “Pelaksanaan Program BOS pada Tahun Ajaran 2011/2012 pada SMP Negeri 1 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, dan disposisi para pelaksana kebijakan”. Penelitian ini bermaksud mengetahui dan memahami terhadap Pelaksanaan Program BOS pada Tahun Ajaran 2011/2012 pada SMP Negeri 1 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Adapun tujuan yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana komunikasi, sumber daya, dan disposisi para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan program BOS.

Beberapa tujuan dari pelaksanaan agar sesuai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga pengalokasian dana BOS tepat sasaran.
- 2) Diperlukan sumber daya yang berkualitas dalam pengambilan keputusan untuk pemanfaatan dana BOS agar dapat terealisasi dengan baik.
- 3) Para implementor kebijakan harus memiliki sikap atau perspektif yang sama dalam melaksanakan program BOS dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan (AG. Subarsono, 2005:90).

METODE

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menuliskan tentang masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Penelitian ini mengungkapkan apa adanya dari kenyataan yang ada di lapangan pada saat kegiatan peneliti lakukan.

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus terjun kelapangan dan berada disana dalam waktu yang cukup lama. Apa yang dilakukan oleh peneliti kualitatif banyak persamaannya dengan detektif atau mata-mata, penjelajah, atau jurnalis yang juga terjun ke lapangan untuk mempelajari manusia tertentu dengan mengumpulkan data yang banyak. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN 1 Sintang. Lokasi penelitian bertempat di SMPN 1 Sintang jalan Apang Semangai. Dalam penentuan lokasi penelitian, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh peneliti, terutama berkaitan dengan subansi dari lokasi penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Secara lengkap pemilihan instansi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan terdapatnya permasalahan yang menyangkut pelaksanaan program pemerintah tentang BOS pada SMPN 1 Sintang. Dianggap penting untuk diteliti karena pelaksanaan program BOS yang belum secara maksimal dilaksanakan pada SMPN 1 Sintang, sehingga saya merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian.

Dari penelitian yang saya lakukan banyak hal yang telah dikemukakan seperti jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun ajaran serta penggunaan dana BOS untuk apa-apa saja. Dalam penelitian ini menjelaskan pelaksanaan program BOS yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BOS yang telah ditetapkan dimana permasalahan tersebut adalah tentang ketersediaan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan yang sudah rusak. Padahal dalam Juklak BOS program dana BOS yang didapat oleh sekolah dapat dialokasikan untuk pembiayaan perawatan sekolah.

Penelitian ini juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris Dinas Pendidikan (Manajer BOS), bendahara, ketua komite sekolah, perwakilan guru, dan ketua OSIS. Semua wawancara pada dasarnya menanyakan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi serta sikap para pelaksana kebijakan.

PELAKSANAAN PROGRAM BOS PADA SMPN 1 SINTANG

Pelaksanaan Program BOS Pada SMPN 1 Sintang. Dalam penelitian ini penulis telah mengumpulkan sejumlah informasi dari beberapa pihak yang sekaligus dijadikan sebagai sasaran penelitian, yang mana terlibat dalam program dan menaruh perhatian pada pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Bendahara Sekolah, Ketua Komite Sekolah, Perwakilan Guru, dan Ketua OSIS SMPN 1 Kecamatan Sintang.

Pada penelitian ini berbagai data yang penulis peroleh telah dipelajari agar dapat mendukung penelitian. Langkah selanjutnya telah diadakan wawancara bebas dengan menggunakan pola indepth interview (wawancara mendalam) dengan sasaran subjek dari penelitian ini.

1. **Alokasi Dana BOS.** Berdasarkan keterangan dari para informan dapat diketahui, monitoring yang dilakukan terhadap sekolah melalui perwakilan dari Dinas Pendidikan dirasa oleh peneliti kurang karena hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun ajaran, seharusnya monitoring yang dilakukan lebih dari satu kali agar permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah dalam melaksanakan BOS benar-benar

diketahui dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diantaranya mengenai pengalokasian dana BOS yang belum tepat sasaran. Selain itu juga dari pihak sekolah secara bersama-sama dengan semua anggota organisasi yang ada berkoordinasi dengan baik untuk melaksanakan program BOS ini agar berjalan dengan efektif sehingga sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Berdasarkan fakta hasil penelitian fenomena komunikasi yang diperoleh dari para informan mengenai koordinasi, sosialisasi, dan monitoring dalam melaksanakan program BOS dapat disimpulkan bahwa, proses komunikasi yang telah dilakukan masih belum berjalan secara optimal antar pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, harus terjadi komunikasi dua arah yang baik agar tercipta koordinasi yang efektif dan sosialisasi yang lebih tepat sasaran sehingga dapat dipahami dengan seksama. Adapun kejelasan informasi hasil penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa, informasi yang disampaikan masih belum jelas dari komunikator terhadap para target kebijakan menyebabkan terdapat alokasi dana BOS yang belum tepat sasaran.

2. **Pengambilan Keputusan Dalam Pemanfaatan.** Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan dapat disimpulkan bahwa, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan BOS pihak sekolah membuat kebijakan sendiri atau secara intern di luar kebijakan BOS yang telah ditetapkan. Hal demikian tidak dibenarkan, seharusnya pihak sekolah mematuhi tentang peraturan-peraturan dalam mengelola dana BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap bahwa, masih ada fasilitas-fasilitas penunjang sarana pendidikan yang belum memadai dan yang telah rusak namun belum diperbaiki yang disebabkan oleh kemampuan sumber daya yang belum begitu terampil dalam mengelola dana BOS. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam menelaah permasalahan yang terjadi antara pelaku kebijakan tentang pelaksanaan BOS dan upaya untuk mengatasinya. Para pelaku kebijakan tidak bekerjasama dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam pengambilan suatu keputusan terlihat bahwa mutlak di tangan pimpinan dan sepertinya mengesampingkan pendapat-pendapat dari bawahan yang mungkin lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang sedang

terjadi. Oleh karena itu, pelaksanaan program BOS yang dijalankan masih belum maksimal.

3. **Sikap Para Pelaku Kebijakan.** Menurut keterangan dari para informan yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa penggunaan dana BOS belum transparan, tidak sesuai dengan RKAS yang telah dibuat. Hal ini terbukti dengan masih adanya fasilitas penunjang pendidikan di sekolah yang belum memadai dan belum dilakukan pembenahan. Selain itu juga pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana BOS oleh Kepala Sekolah tidak diketahui oleh anggota pengurus dana BOS lainnya di sekolah, padahal semestinya pihak sekolah secara bersama-sama mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS yang dikeluarkan dan secara bersama-sama pula dengan jajaran pengurus yang ada berupaya untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program BOS ini. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sikap para pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa, para pelaksana kebijakan tidak memiliki pandangan yang sama dalam usaha untuk mensukseskan pelaksanaan program, menyebabkan para pelaksana kebijakan tidak berkerjasama dengan optimal sehingga timbul banyak permasalahan pada saat melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan harus adanya kesamaan konsep dari para pelaksana yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga akan tercipta tujuan yang akan dijalankan secara bersama-sama dan apabila terjadi kendala pada saat pelaksanaannya akan diselesaikan secara bersama-sama serta dipertanggungjawabkan secara bersama-sama pula. Apabila hal ini dilakukan, pelaksanaan program BOS pada SMPN 1 Sintang akan dapat berjalan dengan efektif dan optimal karena, pada dasarnya sikap para implementor kebijakan sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai esensi suatu kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap organisasi dan berbagai kepentingan yang terdapat di dalamnya.

PENUTUP

Pada aspek komunikasi antar pelaku kebijakan dalam pelaksanaan mengenai pengalokasian dana BOS dapat ditemui beberapa faktor di dalamnya yaitu koordinasi, sosialisasi, dan monitoring yang dapat dijelaskan bahwa sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah tentang pelaksanaan BOS hanya secara

garis besar saja yang mengakibatkan pihak sekolah kurang memahami tentang peraturan penggunaan dana BOS yang begitu kompleks sehingga menyebabkan sekolah membuat kebijakan sendiri dalam melaksanakan BOS. Mengenai koordinasi yang dilakukan antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan BOS belum berjalan dengan efektif, selain itu juga sasaran komunikasi yang ditetapkan kurang tepat. Di mana koordinasi antar pihak sekolah dengan komite sekolah beserta dewan guru telah terjadi miss komunikasi atau terjalin proses komunikasi yang tidak baik, sehingga menyebabkan kerjasama antar pengurus berjalan dengan tidak lancar. Monitoring yang dilakukan oleh tim manajemen BOS baik dari pusat atau provinsi telah dilaksanakan beberapa kali serta mengevaluasi program BOS yang telah dijalankan, namun masih ada permasalahan yang terjadi pada SMPN 1 Sintang dalam melaksanakan BOS yakni tentang sarana penunjang pendidikan yang kurang memadai dikarenakan terdapat pengalokasian dana yang belum tepat sasaran. Pada aspek sumber daya dalam pengambilan keputusan untuk pemanfaatan dan BOS terungkap bahwa, kemampuan sumber daya yakni sumber daya manusia yang belum begitu terampil untuk mengelola dana BOS. Hal ini terbukti dengan masih ada fasilitas-fasilitas penunjang sarana pendidikan yang kurang memadai dan yang telah rusak namun belum diperbaiki. Padahal untuk perbaikan ringan sekolah untuk sarana pendidikan sudah dicantumkan dalam RKAS namun tidak dilaksanakan. Pada aspek sikap para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan program BOS menunjukkan bahwa, sikap para pelaksana kebijakan tidak memiliki pandangan yang sama dalam usaha untuk mensukseskan pelaksanaan program yang menyebabkan para pelaksana kebijakan tidak bekerjasama dengan baik atau optimal, sehingga timbul permasalahan pada saat melaksanakan kebijakan.

Agar komunikasi antar pelaku kebijakan mengenai pengalokasian dana BOS tepat sasaran dan terciptanya komunikasi dua arah yang baik maka, pihak sekolah harus bersikap terbuka terhadap dewan guru dan komite sekolah mengenai anggaran BOS yang dikeluarkan. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan agar kedepannya memberikan sosialisasi yang lebih mendetail mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan program BOS pada SMPN 1

Sintang agar pihak sekolah memahami dengan baik peraturan tentang BOS dan tidak membuat kebijakan sendiri di luar kebijakan BOS yang telah ditetapkan oleh pusat. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terhadap SMPN 1 Sintang semestinya tidak hanya dilakukan satu kali saja dalam satu tahun ajaran melainkan berkali-kali, agar permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan BOS diketahui dengan baik sehingga dapat diselesaikan dengan tuntas. Kepada pihak SMPN 1 Sintang diharapkan agar menggunakan dana BOS sesuai dengan RKAS yang telah dibuat yang mendasar pada Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS. Agar pelaksanaan BOS pada SMPN 1 Sintang dapat berjalan dengan baik maka, pihak-pihak yang terlibat di dalam kepengurusannya yakni pihak sekolah dengan dewan komite diharapkan bekerjasama secara efektif dan optimal sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan permasalahan yang terjadi di sekolah dapat teratasi. Keputusan yang diambil oleh Kepala Sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah berkaitan dengan pelaksanaan BOS hendaknya dimusyawarahkan dengan para guru beserta ketua komite sekolah agar pengeluaran dana BOS dilakukan dengan transparan dan disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan. Hendaknya sekolah tidak lagi melakukan pungutan terhadap orang tua siswa mengenai pembelian buku paket karena untuk pembelian buku pelajaran bagi siswa gratis dan telah tertera jelas dalam buku pedoman pelaksanaan BOS. Diharapkan kepada semua jajaran pengurus BOS yang ada di sekolah memiliki pandangan yang sama agar tercipta tujuan yang berdampak positif bagi sekolah sehingga, kedepannya pelaksanaan BOS yang merupakan program untuk pengembangan pendidikan khususnya bagi SMPN 1 Sintang lebih baik lagi dari sebelumnya. Program BOS diharapkan ke depannya supaya terus diperpanjang serta cakupan programnya tidak hanya pada SD dan SMP saja, tetapi sampai perguruan tinggi agar biaya pendidikan tidak menjadi beban masyarakat pada Kabupaten Sintang khususnya yang setiap tahun semakin bertambah dan di sisi lain juga biaya hidup di Kabupaten Sintang yang lumayan besar. Program BOS diharapkan ke depannya juga harus mempertimbangkan pada alokasi-alokasi dalam upaya untuk mensejahterakan para guru mengingat lokasi kondisi geografis, lingkungan budaya, dan beban kerja yang diemban

setiap guru di Kabupaten Sintang ini cukup berat. Pada SMPN 1 Sintang ini perlu adanya alokasi yang lebih khusus untuk melengkapi buku-buku ajar di perpustakaan sehingga dapat mencukupi dari jumlah siswa yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 1984. *Strategi Komunikasi*, Armico, Bandung.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Cangara, Hafied. 2003. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, U. Onong. 2000. *Ilmu Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik Terjemahan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kuswandi, Wawan. 1996. *Komunikasi Masa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Masykur, Ali. Musa. 2009. *Politik Anggaran Pendidikan*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Arni. 2005. *Komunikasi Organisasi*, Cetakan Ketujuh, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mustopadidjaja, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, ALFABETA, Bandung.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 1997. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabetha, Bandung.
-, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketiga, Alfabetha, Bandung.

- Sugito, 1995. *Studi Implementasi Kebijakan Tata Niaga*, Kalimantan Barat, FISIPOL UNTAN, Pontianak.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, ALFABETA, Bandung.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, Bandung.
- Wahab, Solichin. Abdul. 1990. *Pengantar Kebijakan Negara*, Rhimena Cipta, Jakarta.

Peraturan-Peraturan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Tentang APBN Tahun Anggaran 2011.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009. Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010. Tentang Penggunaan Dana BOS, Tahun Anggaran 2011.*
- Petunjuk Pelaksanaan Program Dana BOS, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 2005.*
- Petunjuk Pelaksanaan Program Dana BOS, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 2006.*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Robertus Sirang Framita
NIM / Periode lulus : E01107109 / Tahun 2013
Fakultas/Jurusan : FISIPOL / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/HP : robethambrossio@ymail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....PubliKA.....*) pada Program Studi.....Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pada SMP Negeri 1 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....Dr. Erdi S. Sos, M.Si

NIP. 19670727 200501 1001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 7 Mei 2013

(Robertus Sirang F.)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(PubliKA/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).